

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sudah menghasilkan berbagai perubahan. Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi faktor dalam mempercepat reformasi birokrasi, salah satunya adalah lahirnya kebijakan e-kinerja di Kota Probolinggo. Lahirnya kebijakan e-kinerja dikarenakan adanya pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tidak efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ekinerja di Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan sampling purposive dan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal penerapan kebijakan e-kinerja tidak semuanya berjalan dengan lancar ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sumberdaya manusia yang tidak bisa menggunakan teknologi berbasis elektronik karena kapasitas yang dimiliki terbatas dan non manusia seperti kurangnya fasilitas komputer dan jaringan internet; Tangapan dari pegawai juga berbeda-beda, ada pegawai yang mendukung kebijakan e-kinerja karena adanya keadilan dalam pemberian tunjangan kerja serta timbulnya persaingan kerja yang sehat antar pegawai dan ada juga yang menolak karena merasa kebijakan e-kinerja memberatkan; Faktor penghambat implementasi kebijakan e-kinerja adalah sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Oleh karena itu, kekurangan terhadap sumberdaya manusia dan non manusia terus ditingkatkan seperti melakukan sosialisasi, pelatihan dan juga penambahan fasilitas komputer serta internet agar kebijakan e-kinerja dapat berjalan dengan maksimal.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, E-kinerja**

## **ABSTRACT**

The implementation of decentralization and regional autonomy in Indonesia has resulted in various changes. The delegation of authority given by the central government to regional governments is a factor in accelerating bureaucratic reform, one of which is the birth of the e-performance policy in Probolinggo City. The birth of the e-performance policy was due to the presence of employees who did not work in accordance with their main duties and functions, thus the results of work carried out by employees were not effective, efficient, transparent and accountable. This study aims to determine the implementation of performance policies at the Regional Secretariat of Probolinggo City. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. While taking samples using purposive sampling and data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that at the beginning of the implementation of the e-performance policy, not everything went smoothly, there were several problems encountered, such as human resources who could not use electronic-based technology because their capacity was limited and non-human, such as a lack of computer and internet network facilities; The responses from employees also varied, there were employees who supported the e-performance policy because of fairness in the provision of work benefits and the emergence of healthy work competition among employees and there were also those who refused because they felt the e-performance policy was burdensome; The inhibiting factors for the implementation of e-performance policies are inadequate human resources and facilities and infrastructure. Therefore, the shortage of human and non-human resources continues to be improved, such as conducting socialization, training and also adding computer and internet facilities so that the e-performance policy can run optimally

**Keywords: Implementation, Policy, E-performance**